

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Suparji, Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2008), hal. 1.
- Radjagukguk Erman, *Hukum investasi Di Indonesia*. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2006), hal. 19.
- Joesoef Iwan Erar, “Public Private Partnership (PPP) In Toll Road Case in Indonesia”.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019*, hal 5.
- Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Optimisme KPS di Indonesia, (2013), hal 8.
- Hariadi Daddy, “Managing Public Infrastructure: The CMNP’S Experience Paper”.
- Hartono Sunaryati, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Bandung: PT. Bina Cipta, 1979), hal. 30.
- G. Kartasapoetra, dkk, Manajemen Penanaman Modal Asing (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal, 84-85.
- Shiger Lestie dan Stephanie Saterfield, How Do You Like Your Infrastrcture: Public or Private, (SMPS Foundation), hal 2.
- Adji Gunawan, MT. *The Smart Handbook Of Public Private Partnership*, hal 3.
- Soegono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: fRaja Grafindo Persada, 2005), hal 111.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal 118.
- Soekanto Soerjono, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990), hal 67.

- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1991), hal 264.
- Syahrani Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 1999) hal 23.
- Ali Achmad, Menguk Tabir Hukum, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal 82.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI Pers, 1976), hal 132.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 7.
- Putra Ida Bagus Wyasa, dkk, Hukum Bisnis Pariwisata, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal 15.
- Wignjosoebroto Soetandyo, Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), hal 457.
- C.F. Horner and L.M. Liebster, The Hamlyn Pocket Dictionary of Business Terms, (London: The Hamlyn Publishing Group Limited, 1980), hal 155.
- Paskarina Caroline, “Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Pelayanan Publik”, hal 2.
- M. Kurdi Yasin, Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Bidang Infrastruktur, 2004.
- Satriawan Nugroho Budi, The Public-Private Partnership: On The Case of Infrastructure Project, (Jakarta, 2012), hal 1.
- Detmon Jeffry, BOO/BOT Projects A Commercial An Contractual Guide, (London: Sweet and Maxwell, 2009), hal 1.
- E. R. Yescombe, Public Private Partnership Principle of Policy and Finance, cet. 1. (Oxford Butterworth-Heinemann, 2007), hal 1.
- Sari Wiyono, Project Financing Agreements, (Depok, 2014), hal 3.

- William D. Eggers dan Tiffany Dovey dalam Closing America's Infrastructure Gap: The Role of Public Private Partnership.
- E. R. Yescombe, Public Private Partnership: Principles of Policy and Finance, 1st Ed, (Oxford: Elsevier Ltd, 2007) hal 4.

B. WEBSITE

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181022160441-4-38483>
- <https://kppip.go.id/tentang-kppip/>
- <https://katadata.co.id/berita/2017/10/19/beragam-cara-mendanai-proyek-infrastruktur>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Menteri Nomor Perencanaan Pembangunan Nasional 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK 011/2010 tentang Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
- Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK011/2015 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur